



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029**



**KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025**



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,



SAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...

26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah : k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.4 Isu Strategis	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1 Tujuan	49
3.2 Sasaran	49
3.3 Strategi	50
3.4 Arah Kebijakan	55
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	59
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	59
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	135
BAB V. PENUTUP	137

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.2.1 : Komposisi ASN Menurut Jenis Jabatan	20
Tabel 2.1.2.2 : Komposisi ASN Menurut Golongan	21
Tabel 2.1.2.3 : Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan	21
Tabel 2.1.2.4 : Daftar Aset	22
Tabel 2.2.1 : Capaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Selama Periode Tahun 2019 – 2024 Bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga.....	23
Tabel 2.2.2 : Capaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Selama Periode Tahun 2019 – 2024 Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.....	25
Tabel 2.2.3 : Capaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Selama Periode Tahun 2019–2024 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	26
Tabel 2.2.4 : Capaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Selama Periode Tahun 2019 – 2024 Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.....	27
Tabel 2.2.1.1 : Kelompok Sasaran Layanan	28
Tabel 2.3.1.1 : Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2025-2029 dengan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.....	35
Tabel 2.3.1.2 : Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029...	37
Tabel 2.3.1.3 : Keterkaitan Dokumen RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029.....	40
Tabel 2.4.1 : Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	45
Tabel 3.2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2025-2029.....	50
Tabel 3.3.1 : Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2025-2029	52
Tabel 3.3.1.1 : Penahapan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Seruyan 5 Tahun Mendatang	55
Tabel 3.4.1 : Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	57
Tabel 4.1.1 : Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra.....	69

Tabel 4.1.2	: Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	76
Tabel 4.1.3	: Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	120
Tabel 4.1.4	: Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ...	124
Tabel 4.1.5	: Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	129
Tabel 4.2.1	: Penetapan Target Indikator Kinerja Utama	135
Tabel 4.2.2	: Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Program	136

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

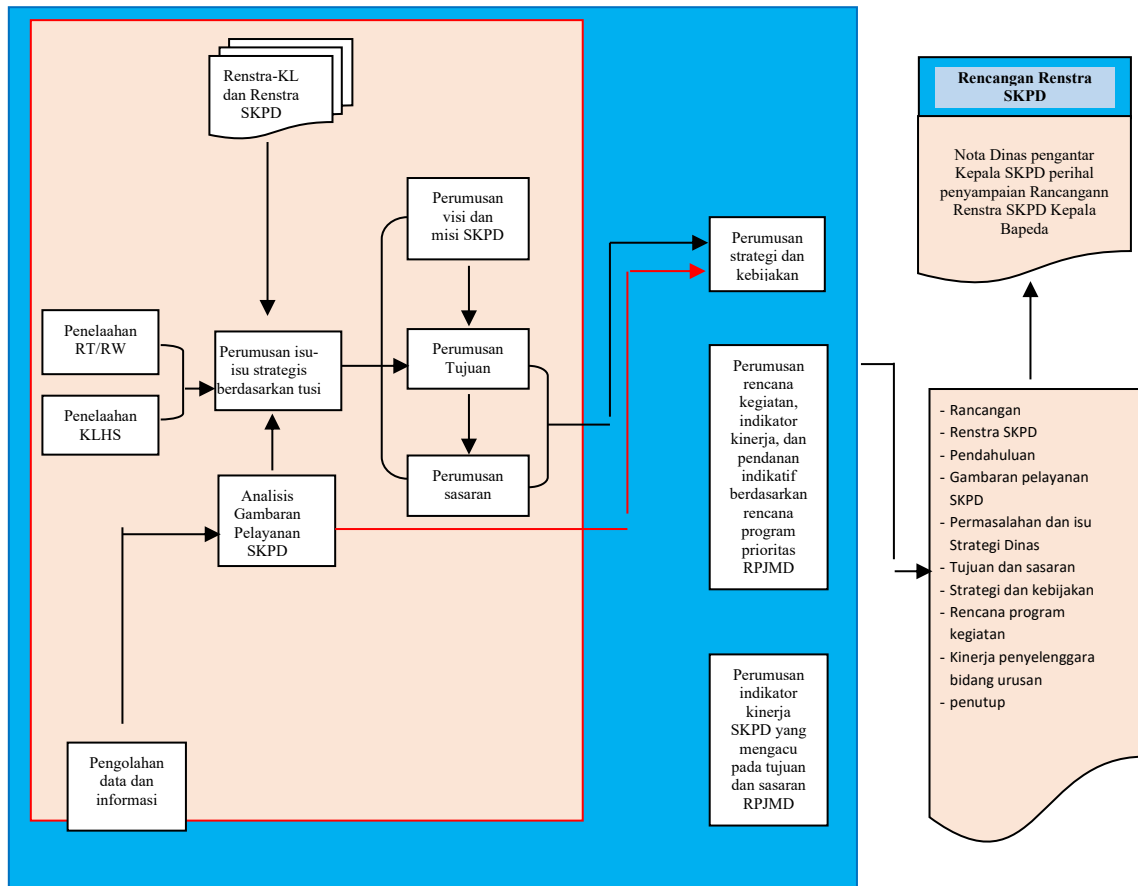
Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan sebagai suatu organisasi terus

menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 Tahun dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam periode tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Sebagai tolok ukur pencapaian target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
- 3) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu 2025-2029.

1.3 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan, permasalahan layanan dan isu-isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGISD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 21 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan, tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas P3AP2KB mempunyai fungsi:

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

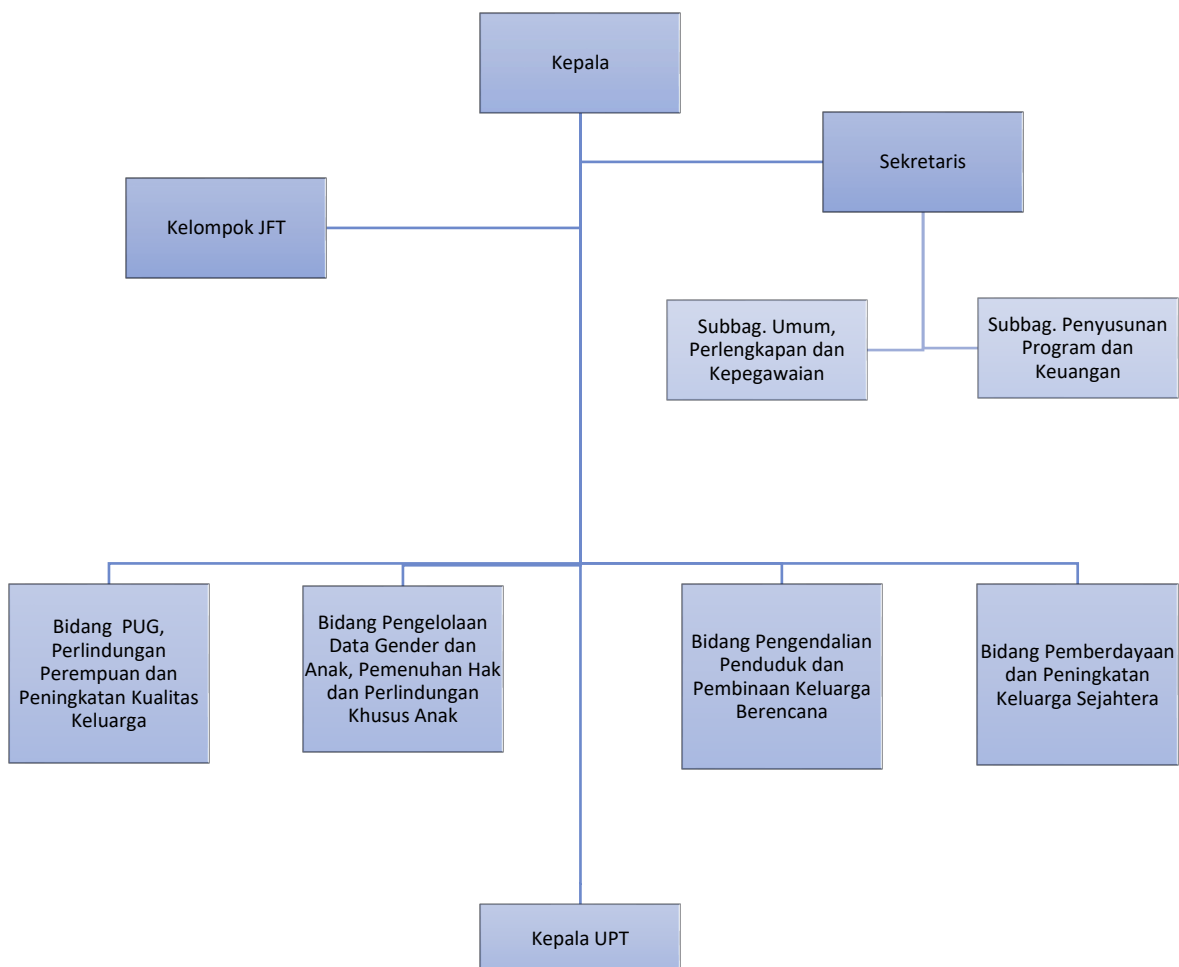
b. Sekretaris Dinas;

- Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan
- Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

- c. Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana
- f. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



2.1.1 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural DP3AP2KB

1. Kepala Dinas

Tugas Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas; Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender, kualitas hidup, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan peningkatan keluarga berencana;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas; Pelancaran dan pengoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

- 4) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan;
- 5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.;

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
- 3) Pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
- 4) Pengoordinasian administrasi Barang Milik Daerah dinas;
- 5) Pengoordinasian administrasi kepegawaian dinas;
- 6) Pengoordinasian administrasi umum dinas;
- 7) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- 8) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;
- 9) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- 10) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
- 2) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dinas;
- 3) Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen perubahan rencana kerja anggaran dinas;
- 4) Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen pelaksana anggaran/ dokumen pelaksana perubahan anggaran dinas;
- 5) Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja dinas;
- 7) Melaksanakan administrasi keuangan dinas;
- 8) Menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;

- 2) Melaksanakan administrasi umum dinas;
- 3) Melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- 4) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah dinas;
- 5) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- 6) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan operasional program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan rencana program dan kegiatan dibidang PUG, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;
- 2) Perumusan dan mensosialisasikan pelaksanaan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten;
- 3) Pelaksanaan sosialisasi dan mengkoordinasikan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten;
- 4) Pengoordinasian dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten;
- 5) Penguatan pelaksanaan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten;

- 6) Pengoordinasian dan mensosialisasikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- 7) Pengoordinasian dan mensosialisasikan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- 8) Pengoordinasian pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten;
- 9) Pelaksanaan sosialisasi dan perumusan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten;
- 10) Perumusan dan pengoordinasian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten;
- 11) Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas mengelola Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan data gender dan anak, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;

- 2) Perumusan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten;
- 3) Pengoordinasian pelebagaan pha pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten;
- 5) Perumusan dan mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- 6) Pengoordinasian penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- 7) Pengoordinasian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
- 8) Perumusan dan mengoordinasikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
- 9) Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga

Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB mempunyai tugas Pemaduan dan Sinkronisasi Program Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB dan

Pendayagunaan Tenaga PKB dan PLKB dalam upaya mewujudkan Program KB.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan rencana program dan kegiatan dibidang pengendalian penduduk dan pembinaan KB;
- 2) Pengoordinasia dan mensosialisasikan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 3) Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
- 4) Pengoordinasian dan mensosialisasikan advokasi, KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- 5) Pengoordinasian Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
- 6) Penyeliaan dan memeriksa pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten;
- 7) Pengoordinasian dan mensosialisasikan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- 8) Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

8. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga, Advokasi, KIE

Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan rencana program dan kegiatan dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- 2) Perumusan, mensosialisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 3) Perumuskan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 4) Penilaian dan pengevaluasian sasaran kiner pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- 5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.

Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

10. Unit Pelaksana Teknis

UPTD pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan, UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis

penunjang tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan, fungsi dan uraian tugas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas P3AP2KB

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukungnya tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, seklaigus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan didukung sumber daya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis Kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2.1

Komposisi ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1

3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Kepala UPT	1
6.	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	3
7.	Penyuluh Sosial Ahli Muda	4
8.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2
9.	Pengadministrasi Perkantoran	12
10.	Pranata Komputer Ahli Pertama	2
11.	Pranata Komputer Terampil.	2
Jumlah		34

Tabel 2.1.2.2
Komposisi ASN Menurut Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	3
3.	Penata Tingkat I	III/d	1
4.	Penata	III/c	4
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
6.	Penata Muda	III/a	5
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	3
8.	Pranata Komputer	9	2
9.	Layanan Operasional	7	2
Jumlah			34

Tabel 2.1.2.3
Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana S2	7
2.	Sarjana S1	13
3.	Sarjana Muda / D3	5
4.	SLTA	9
	Jumlah	34

b. Aset SKPD (BMD)

Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.4

Daftar Aset

- Tanah	Rp. 50.460.000,-
- Peralatan dan Mesin	Rp. 4.399.324.888,-
- Gedung dan Bangunan	Rp. 6.085.211.970,-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 875.000,-
- Aset Tetap Lainnya	Rp. 17.722.950,-
- Aset Lain-lain	Rp. 12.510.416,-

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Umum kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Kegiatan pengarusutamaan gender secara umum yaitu strategi untuk mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan laki-laki dan perempuan dipertimbangkan dan diakomodasi secara adil dalam semua proses pembangunan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2019-2024, antara lain :

- Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada organisasi perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.
- Memastikan terlaksananya perencanaan dan penganggaran responsif gender pada perangkat daerah yaitu program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

- Memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- Membentuk Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak (SIGRAKPA) di setiap kecamatan.
- Memberikan edukasi dan mendorong mengembangkan kepemimpinan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan pemerintahan.
- Meningkatkan kualitas keluarga terutama pada kelompok rentan (perempuan sebagai tulang punggung keluarga) melalui pelatihan ketrampilan, dan kemandirian berwirausaha.

Tabel 2.2.1

Capaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Selama Periode Tahun 2019 – 2024
Bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan
Peningkatan Kualitas Keluarga.

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KDRT	Kasus	1	0	1	2	2	3
Selesai Tindak Pidana KDRT	Kasus	1	0	1	2	2	3
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	0	100	100	100	100
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	12	12	12	12	12	12
Jumlah Organisasi Perempuan	organisasi	14	14	14	14	8	8
Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	organisasi	3	3	3	3	3	2
Jumlah Perempuan Rentan	Orang	5.250	5.250	5.727	5.727	7.176	7.176

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perempuan Rentan Peserta Pelatihan Ketrampilan	Orang	TAD	TAD	TAD	TAD	30	100
Jumlah OPD	Perangkat Daerah	40	40	40	40	40	40
Jumlah OPD yang menganggarkan ARG	Perangkat Daerah	TAD	TAD	TAD	TAD	21	32

B. Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Kegiatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan anak secara umum melakukan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke hak-hak dasar mereka yang telah diakui secara internasional, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989, dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan bahaya lain yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data gender dan anak untuk mengidentifikasi pola trend dan kesenjangan gender dan anak.
- Memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
- Melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi.
- Memastikan anak memiliki akses dan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan gizi yang baik.
- Memfasilitasi partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak.
- Mendorong pembangunan yang berfokus pada kebutuhan dan kepentingan anak, serta memastikan anak memiliki akses ke sumber daya.

- Membentuk forum anak daerah disetiap kecamatan dan sekolah-sekolah.

Tabel 2.2.2

**Capaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Selama Periode Tahun 2019 – 2024
Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak**

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak.	Kasus	7	17	10	12	8	8
Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani/ terselesaikan.	Kasus	7	17	10	12	8	8
Forum Anak Daerah	Kecamatan	-	6	8	8	8	7

C. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana.

Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga dan pembangunan keluarga.

Dapaun kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kontrasepsi, perluasan pilihan dan informasi setiap alat kontrasepsi sehingga inform concent dan inform choice menjadi landasan setiap peserta KB untuk memilih metode kontrasepsi yang paling tepat untuk diri mereka.
- Penyuluhan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait penurunan angka perkawinan pada remaja.
- Menurunkan angka kelahiran pada remaja seperti penundaan usia perkawinan.

- Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja karena berisiko pada kematian ibu dan anak, risiko gizi kurang serta risiko stunting pada anak.
- Memberikan informasi dan edukasi tentang keluarga berencana.
- Memberikan pelayanan KB kepada Pasangan Usia Subur
- Melakukan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
- Melakukan pembinaan kepada tenaga lini lapangan PKB/PLKB.
- Membina Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa dan kelurahan.
- Melaksanakan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk untuk memantau respon isu-isu kependudukan secara proaktif.
- Melakukan pendataan/updating data keluarga setiap tahun.

Tabel 2.2.3

Capaian kinerja layanan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama tahun 2019-2024.

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Angka/Rate	2	2,24	2,31	2,20	2,20	2,20
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,04	0,02	0,02	1,48	1,81	1,48
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	1,5	1,5	63	74,38	100	12
Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan PD KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan masyarakat	%	100	100	96	100	100	100
Jumlah Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas	Angka	19	19	19	19	19	100

D. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera,
Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019-2024 antara lain :

- Membentuk dan membina kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di setiap desa.
- Memberikan bimbingan/konseling kepada calon pengantin tentang kesehatan reproduksi.
- Membentuk sekolah lansia.

Tabel 2.2.4
Capaian kinerja Pelayanan DP3AP2KB Selama Periode Tahun 2019-2024
Urusan Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	21	28	100	180	100	83
Persentase PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	%	10,2	11,6	100	100	100	84
Persentase Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	56	56	100	100	80	88
Persentase Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	41	41	100	100	100	88
Persentase Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	20	20	100	100	78	80

2.2.1 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.

Kelompok Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan adalah :

Tabel 2.2.1.1
Kelompok Sasaran Layanan

Bidang Urusan	Kelompok Sasaran Layanan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan : - Perempuan kelompok rentan - Perempuan berdaya/berprestasi - Organisasi Perempuan. - Anggota Keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya
	Perlindungan Anak : - Anak yang berhadapan dengan hukum - Anak yang memerlukan perlindungan hukum - Anak remaja/usia sekolah - Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.
	Jejaring Program : - Pemerintah - Masyarakat - Swasta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan : - Remaja - Calon Pengantin - Pasangan Usia Subur - Ibu Hamil - Ibu Pasca Salin/Menyusui - Keluarga yang memiliki baduta dan balita - Keluarga yang memiliki remaja - Keluarga yang memiliki lansia - Keluarga yang tergabung dalam UPPKA Pembinaan Tenaga Lini Lapangan : - Penyuluh KB/PLKB ASN dan Non ASN - PPKBD - Sub PPKBD - Kader Poktan

	- Mitra lainnya Pengelola Data : - Penyuluh KB/PLKB - Kader IMP. Pengelola dan pelaksana PPKS di Balai Penyuluhan KB : - PKB/PLKB - Guru PAUD - Bidang - Genre Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi : - Fasyankes Operasioal Koordinasi Pelayanan KB di Fasyankes : - Dinas P3AP2KB - Dinas Kesehatan - Pimpinan Faskes - Organisasi Profesi (POGI, IBI, IDI dll) - Mitra Kerja Potensial lainnya.
--	--

2.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah Seruyan maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan Bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, sebagai berikut :

- 1) Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum terintegrasi dalam siklus pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga output kegiatan masih belum tampak berfokus pada 5 afirmasi gender yaitu perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok marginal;
- 2) Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya dipahami oleh stakeholder sehingga masih ada anggapan bahwa upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender hanya menjadi tanggungjawab dinas pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan pengambilan keputusan.
- 4) Keterwakilan perempuan di legislatif belum memenuhi quota meskipun sudah ada regulasinya.
- 5) Perempuan banyak bekerja di sektor non formal sehingga tidak ada perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun pemutusan hubungan kerja.
- 6) Belum optimalnya peran lembaga/forum/organisasi perempuan di masyarakat.
- 7) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha tentang Pemberdayaan Perempuan belum optimal.
- 8) Kondisi geografis antar kecamatan, antar desa yang masih sulit dijangkau sehingga tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan masih rendah.
- 9) Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak teridentifikasi dimasyarakat yang disebabkan keengganan korban untuk melapor ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 10) Belum tersedianya layanan cepat tanggap berbasis online yang bisa menjangkau keseluruhan wilayah desa.

- b. Permasalahan Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap anak.
 - 2) Sulitnya mendekteksi kasus penelantaran pada anak kecuali yang dilaporkan.
 - 3) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti perkawinan usia anak, pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum.
 - 4) Belum tersedianya fasilitas yang berorientasi pada kreatifitas anak.
 - 5) Tingginya kenakalan remaja dan anak terindikasi narkoba.
 - 6) Resiko meningkatnya kekerasan berbasis gender online.
 - 7) Kurang optimalnya layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak disebabkan belum tersedianya tenaga ahli.
 - 8) Belum optimalnya pengolahan data dasar anak.
 - 9) Belum optimalnya peran forum anak dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi di berbagai perangkat daerah.
 - 10) Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak dari pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap anak.
 - 11) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait perlindungan anak khususnya penanganan kekerasan terhadap anak maupun perdagangan anak.
- c. Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :
- 1) Menghindari penurunan dan peningkatan TFR yang berkelanjutan (Mempertahankan TFR = 2,1 anak perwanita)
 - 2) Belum maksimalnya penggunaan kontrasepsi modern
 - 3) Partisipasi laki-laki ber-KB masih rendah.
 - 4) Persebaran penduduk tidak merata.
 - 5) Masih tingginya perkawinan usia anak.

- 6) Tingginya angka perceraian.
 - 7) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja.
 - 8) Belum optimalnya fungsi Kampung KB di setiap desa.
 - 9) Kurangnya jumlah Tenaga lini lapangan/PKB/PLKB di setiap desa.
- d. Permasalahan Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, sebagai berikut :
- 1) Belum terbentuknya Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di setiap desa.
 - 2) Masih tingginya Keluarga Resiko Stunting (KRS).
 - 3) Semakin renggangnya pola sosial dalam keluarga dan masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi.
 - 4) Meningkatnya permasalahan psikososial pada remaja, terlihat dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja, pernikahan usia dini.
 - 5) Kurangnya wadah kegiatan anak usia remaja sebagai wujud implemementasi kreatifitas remaja diusianya.
 - 6) Meningkatnya jumlah lansia yang kurang produktif.

2.3.1 Telaahan dan Hubungan Antar Dokumen

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2025-2029.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah Untuk Semua”** dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Berkelanjutan**” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.
- **“Sejahtera”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.
- **“Maju”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.
- **“Adil”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
- **“Amanah”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga

tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, misi pembangunan jangka menengah RPJMD adalah :

- **MISI I:** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
- **MISI II:** Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- **MISI III:** Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik
- **MISI IV:** Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- **MISI V:** Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Analisis visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan program yang ada pada urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Misi ke II yaitu ***“Mewujudkan Iklim Kehidupan Yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral Tertib dan Inklusif”***.

Pada tabel berikut ini disajikan keterkaitan antara Renstra DP3AP2KB Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 beserta permasalahannya, faktor penghambat, faktor pendorong keberhasilan penanganannya untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3.1.1

**Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Periode Tahun 2025-2029 dengan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029**

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>Visi</u> Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah Untuk Semua <u>Misi II :</u> Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif.				
<u>Tujuan :</u> Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tertib dan tentram, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, demokrasi, keagamaan, dan moralitas dalam kehidupan yang inklusif dan harmonis. <u>Sasaran :</u> Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.	<u>Tujuan :</u> Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga yang berkualitas. <u>Sasaran :</u> 1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Partisipasi perempuan yang duduk di jabatan publik masih rendah. • Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak • Meningkatnya perkawinan usia anak. • Ruang Bermain Ramah Anak belum tersedia. • Kurangnya kerjasama lintas sektor terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Kurangnya peran serta masyarakat terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Minimnya anggaran program dan kegiatan. • Belum mempunyai psikolog klinis sendiri. • Minimnya Tenaga ahli di UPT PPA yg	• Kapasitas perempuan yang masih rendah. • Kesadaran masyarakat terhadap bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Keberanian mengadu masih rendah. • Minimnya sensore konten negative online. • Tenaga Psikolog Klinis yang ada mempunyai jangkauan penanganan antar kabupaten sehingga tidak bisa tertangani dengan baik. • Minimnya fasilitas layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	• Terbukanya kesempatan perempuan duduk dalam jabatan publik. • Fasilitas layanan terhadap perempuan dan anak sudah tersedia (UPT PPA). • Tersedianya berbagai peraturan pencegahan pernikahan usia anak. • Terbentuknya beberapa Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor. • Tersedianya alternatif konten positive inline. • Tuntutan masyarakat akan ruang publik ramah anak. • Terbentuknya Satgas Satuan Gerak Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (SIGRAKPA) tingkat desa. • Tersedianya website pelaporan tindak kekerasan

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		membidangi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangkauan wilayah antar kecamatan dan antar desa yang jauh.		terhadap perempuan dan anak.
	2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga Berkualitas	- TFR Kabupaten seruyan tahun 2024 sebesar 2,21 anak per wanita, mengalami penurunan sebesar 0,07 dibanding TFR tahun 2023 sebesar 2,28 anak per wanita - Realisasi TFR untuk Kabupaten Seruyan tahun 2024 mencapai 2,21 anak per wanita, hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran total masih tinggi, diatas target Nasional tahun 2024 sebesar 2,11 anak perwanita - Angka Kelahiran pada kelompok usia 15-19 tahun (ASFR) di Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 mencapai 38,9 per 1.000 perempuan, mengalami penurunan 4,6 dibanding ASFR tahun 2023 sebesar 43,5 per 1.000 perempuan - Angka Kelahiran pada kelompok usia 15-19 tahun (ASFR) tahun 2024 di Kabupaten Seruyan mencapai 38,9 per 1.000 perempuan . Tingginya angka ini menunjukkan bahwa kehamilan pada usia remaja masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus - Masih adanya perkawinan anak	- Menurunnya jumlah peserta KB aktif. - Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju untuk ber-KB. - Kurangnya tenaga PLKB. - Jangkauan wilayah antar desa yang terlalu jauh sehingga menyulitkan memberikan pelayanan dan informasi dari tenaga lini lapangan dan kader desa.	- Fasilitas pelayanan kesehatan yang relatif merata. - Semakin bertambahnya jumlah PLKB mealalui PPPK. - Kepedulian pemerintah terhadap program KB. - Semakin mudahnya informasi tentang kontrasepsi melalui media digital.

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dibawah umur (pernikahan dini)		
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Kurangnya pemahaman tentang akuntabilitas - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung sistem kinerja - Terbatasnya anggaran untuk pencapaian target kinerja	- Perencanaan yang tidak efektif - Lemahnya monitoring dan evaluasi intern dinas. - Kurangnya komitmen - Pengawasan yang tidak efektif. - Kurangnya partisipasi masyarakat.	- Kemajuan teknologi informasi sehingga mudah mencari sumber data. - Dokumen perencanaan (RKT, RAK, IKU dan Perjanjian Kinerja) yang disusun secara lengkap sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

Telaah Antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025– 2029 dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025– 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.1.2

Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

VISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	VISI RPJMD KALIMANTAN TENGAH 2025-2029
Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah Untuk Semua	Mengangkat Harkat Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Mangkatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai NKRI Menuju Kalteng maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045
MISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	MISI RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2029
Misi 1: mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat
	Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial
Misi 2: Mewujudkan iklim kehidupan yang berbudaya, demokratis, agamis, bermoral, tertib, dan inklusif	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045

VISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	VISI RPJMD KALIMANTAN TENGAH 2025-2029
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045
	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

Dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, berbagai dokumen perencanaan menjadi acuan utama guna memastikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. Selain memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan nasional serta RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 yang mengarahkan pengembangan wilayah di tingkat provinsi, RPJMD ini juga berlandaskan pada RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 berperan sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. RPJPD ini tidak hanya memuat visi besar pembangunan Kabupaten Seruyan dalam 20 tahun ke depan, tetapi juga memberikan arah strategis bagi setiap tahapan pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 memiliki kesinambungan dengan periode

pembangunan sebelumnya serta menjadi landasan bagi perencanaan pada periode selanjutnya.

Untuk memastikan keterpaduan perencanaan, tahapan pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dirumuskan ke dalam empat tema utama yang menjadi fokus prioritas pembangunan dalam setiap periodenya. Pembagian tema ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi Kabupaten Seruyan, serta memastikan tercapainya visi jangka panjang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Visualisasi tahapan periodisasi pembangunan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sesuai dengan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, periode pertama tahun 2025-2029 difokuskan pada **Fase Penguatan**, yaitu penguatan fondasi transformasi pembangunan di berbagai sektor. Beberapa aspek utama dalam fase ini meliputi: penguatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; peningkatan hilirisasi sektor industri pengolahan serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja; serta penguatan riset dan inovasi daerah. Selain itu, fase ini juga

menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dengan optimalisasi fungsi pemerintahan, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyusunan regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Penguatan regulasi dan ketahanan sosial-ekologi juga menjadi prioritas, seiring dengan pembangunan kewilayahan yang lebih terintegrasi.

Sasaran utama dari fase pertama dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 ini menjadi acuan dalam merumuskan isu strategis untuk Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.3.1.3

**Keterkaitan Dokumen RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dengan
RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029**

RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
VISI	
"KABUPATEN SERUYAN YANG MAJU, TANGGUH, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"	"TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA "
MISI	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Misi 1: mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Sumberdaya Manusia (SDM) unggul
Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta Terwujudnya Supremasi Hukum	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah

RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
Mewujudkan Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Intra dan Antar Wilayah	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana
Meningkatkan Daya Saing dan Ketahanan Daerah	Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, tema yang diusung dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi”**, yang menjadi dasar utama dalam mewujudkan visi jangka panjang RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, yaitu **“Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. Visi ini memiliki makna dan tujuan strategis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Maju**, yang bermakna Kemajuan Kabupaten Seruyan dicapai melalui pembangunan berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan, terutama infrastruktur transportasi. Infrastruktur yang memadai meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, memperlancar arus barang dan manusia, serta menunjang pembangunan wilayah secara merata dan sinkron antara sektor serta hierarki pemerintahan.
2. **Tangguh** memiliki arti Ketangguhan Kabupaten Seruyan ditunjukkan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, dan

lingkungan. Selain itu, sumber daya manusia yang unggul diperlukan agar masyarakat siap menghadapi perubahan.

3. **Mandiri**, Kemandirian Kabupaten Seruyan diwujudkan melalui daya saing yang kuat di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Kemampuan daerah dalam menghadapi guncangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi kunci utama. Tata kelola yang baik memastikan pemerataan akses sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat.
4. **Sejahtera**, Kesejahteraan Kabupaten Seruyan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, perumahan layak, pekerjaan, dan jaminan sosial-ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, disparitas sosial dan ekonomi dapat dikurangi, menciptakan kualitas hidup yang tinggi dan merata bagi seluruh warga.
5. **Berkelanjutan**, yang artinya Kabupaten Seruyan berkomitmen mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Prinsip keberlanjutan mencakup pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya, serta kesinambungan pembangunan sebagai visi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selain itu, di dalam RPJPD Kabupaten Seruyan 2025-2045 memuat 5 (lima) Sasaran Visi yang menjadi landasan untuk pengembangan dan pembangunan serta menjadi agenda jangka panjang Kabupaten Seruyan menuju **Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan**, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sasaran Visi Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Menuju *Net Zero Emission*

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039.

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, selain merujuk pada Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, perlu juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039. RTRW ini memberikan arah dan pedoman mengenai struktur serta pola ruang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sektoral, kewilayahan, dan daerah.

Dokumen RTRW tersebut berperan sebagai acuan utama dalam memastikan bahwa kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD tetap sejalan dengan arah kebijakan tata ruang wilayah. Hal ini bertujuan untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan ruang dalam lima tahun ke depan, yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta indikasi pemanfaatan ruang. Dengan demikian, tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif, kesenjangan wilayah dapat dikurangi, serta tetap mempertahankan keseimbangan tata kelola fungsi keruangan. Selain itu, keselarasan antara sektor dan wilayah dapat terwujud melalui keterpaduan, keterkaitan, serta keseimbangan dalam pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039, yang mengamanatkan berbagai aspek yang harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah dan sektoral sebagai berikut:

1. Mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi;

2. Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan;
3. Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah.
4. Peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya
5. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
7. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
8. Pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan;
9. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
10. Mendorong peningkatan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Seruyan.

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan

pedoman penyusunan RKPD. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

2.4 Isu Strategis

Berdasarkan telaah dan analisis, ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Partisipasi perempuan duduk dalam jabatan publik maupun politik masih rendah.
2. Kemiskinan perempuan dalam kelompok rentan.
3. Peningkatan pernikahan anak usia dini.
4. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Peningkatan kenakalan remaja dan anak terindikasi narkoba.

6. Peningkatan anak berhadapan dengan hukum.
7. Minimnya fasilitas publik ramah anak.
8. Rendahnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
9. Kurang optimalnya fungsi keluarga.
10. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program keluarga berencana.

Tabel 2.4.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
a Meningkatkan sistem pelayanan aduan tindak kekerasan dan eksploitasi b Meningkatkan Sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak. c Mengembangkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. d Meningkatkan Proporsi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan daerah. e Mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. f Mengoptimalkan peran serta kelompok ketahanna keluarga. g Mengoptimalkan pengendalian	a Minimnya Tenaga ahli di UPT PPA yg membidangi penanganan kekerasan b Ruang Bermain Ramah Anak belum tersedia. c Kurangnya kerjasama lintas sektor terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. d Kurangnya peran serta masyarakat terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. e Minimnya anggaran program dan kegiatan. f Jangkauan wilayah antar kecamatan dan antar desa yang jauh. g Belum mempunyai psikolog	Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan, antara lain: a Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi. b Pemenuhan Hak Dasar Anak. c Partisipasi Anak d Pencegahan Perkawinan Anak e Keterbatasan partisipasi perempuan. f Kekerasan terhadap perempuan g Perempuan masih menghadapi stereotip dan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. h Akses terhadap pelayanan KB i Ketersediaan Metode Kontrasepsi. j Peningkatan partisipasi pria dalam KB.	a Perubahan Iklim yang berdampak pada perubahan iklim terhadap perempuan dan anak, perempuan lebih besar karena mereka lebih rentan terhadap bencana alam, kekurangan air, dan kemiskinan. b Ketahanan Pangan, Perempuan pedesaan berperan penting dalam produksi pangan, namun mereka sering menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. c Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak, Perubahan	a Pengarusutamaan Gender: Mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan program pemerintah untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender b Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: Kekerasan domestik dan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang efektif. c Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan kemandirian	a Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan Meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan kemandirian b Perlindungan Terhadap Kekerasan: Melindungi perempuan dan anak dari kekerasan domestik dan seksual, serta menangani kasus-kasus kekerasan dengan efektif. c Pemenuhan Hak Anak: Memastikan anak-anak memiliki	a Partisipasi perempuan duduk dalam jabatan publik maupun politik masih rendah. b Kemiskinan perempuan dalam kelompok rentan. c Peningkatan pernikahan anak usia dini. d Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. e Peningkatan kenakalan remaja dan anak terindikasi narkoba. f Peningkatan anak berhadapan dengan hukum. g Minimnya fasilitas publik ramah anak. h Rendahnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
kuantitas dan kualitas penduduk dalam pembangunan keluarga	h Keterbatasan akses dalam pelayanan KB i Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB dan kesehatan reproduksi j Keterlibatan pria yang masih rendah dalam program KB		iklim dan degradasi lingkungan dapat memperburuk kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama dalam situasi darurat dan krisis. d Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perempuan dan anak memiliki pengetahuan dan keahlian penting dalam pengelolaan sumber daya alam, namun mereka sering tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. e Keseimbangan Ekosistem: Pengendalian penduduk dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengurangi tekanan pada ekosistem dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan f Kemiskinan dan Kesenjangan: Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan meningkatkan akses ke pendidikan,	dan kualitas hidup mereka. d Pemenuhan Hak Anak: Memastikan anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. e Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Mengatasi masalah kependudukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program keluarga berencana yang efektif. f Ketahanan Keluarga: Membangun keluarga yang berkualitas, berketahanan, dan sejahtera melalui penguatan peran keluarga dan dukungan pemerintah. g Sarana dan Prasarana: Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti gedung pelayanan dan rumah aman	akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. d Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui pendidikan dan kampanye. e Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Mengatasi masalah kependudukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program keluarga berencana yang efektif. f Ketahanan Keluarga: Membangun keluarga yang berkualitas, berketahanan, dan dukungan pemerintah.	terhadap anak. i Kurang optimalnya fungsi keluarga. j Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program keluarga berencana.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			kesehatan, dan kesempatan ekonomi.	bagi korban kekerasan.		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025, untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Seruyan dan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan menggambarkan hasil – hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2025 sampai tahun 2029.

Berdasarkan Visi RPJMD Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2025-2029 yaitu **”Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Amanah Untuk Semua”** dan Misi ke 2 yaitu **”Mewujudkan Iklim Kehidupan Yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib dan Inklusif”**. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kabupaten Seruyan untuk mendukung Visi dan Misi tersebut menetapkan tujuan yaitu **“Mewujudkan Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak, Keluarga Yang Berkualitas”**.

3.2 Sasaran

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan

yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuannya maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga Berkualitas.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB Kabupaten Seruyan
Periode Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN						Ket
				TAHUN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga yang berkualitas.		Indeks Pembangunan Gender (IPG).	89,70	89,80	89,90	90,00	90,10	90,20	
		Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	
		Meningkatkan ketahanan keluarga berkualitas.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,70	66,90	68,00	69,10	70,20	71,30	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	55,00	58,00	60,00	61,00	62,00	63,00	

3.3 Strategi

Strategi yang diambil dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029, maka langkah yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel 3.3.1 sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender di semua sektor pembangunan.
2. Meningkatkan peran aktif perempuan di bidang sosial, ekonomi, hukum dan politik.
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi produktif.
4. Mengoptimalkan peran forum anak daerah di setiap kecamatan.
5. Menyediakan ruang bermain ramah anak (RBRA).
6. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam penanganan kenakalan remaja.
7. Menurunkan prevalensi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
9. Pencegahan perkawinan usia anak.
10. Mengoptimalkan pelayanan publik yang ramah anak berbasis online.
11. Meningkatkan Kualitas Data Informasi Keluarga.
12. Meningkatkan pelayanan KB melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
13. Mengoptimalkan fungsi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Tabel 3.3.1

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keluarga yang berkualitas.	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua sektor pembangunan	Pengembangan sistem, kelembagaan, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender
		Meningkatkan peran aktif perempuan di bidang sosial, ekonomi, hukum dan politik	Melakukan pembinaan terhadap organisasi perempuan.
			Mengoptimalkan fungsi penyedia layanan perempuan, PUSPA dan PUSPAGA
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi produktif	Membentuk kelompok ekonomi produktif dengan melakukan pendampingan yang berkelanjutan
		Mengoptimalkan peran forum anak daerah di setiap kecamatan	Menumbuhkan kepedulian dan kewaspadaan anak/siswa terhadap peristiwa yang menyimpang disekitarnya melalui fungsi forum anak daerah
		Menyediakan ruang bermain ramah anak (RBRA).	Mempercepat penyediaan ruang publik ramah anak sebagai wadah aktifitas dan pengembangan kreatifitas anak
		Meningkatkan sistem layanan aduan yang mudah dan cepat	Melakukan kerjasama dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan masyarakat sekitar dalam upaya penanganan kenakalan remaja.
			Menyediakan layanan pengaduan berbasis online/digital.
			Mengoptimalkan fungsi Satgas Siap Gerak Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (SIGRAKPA)
	Meningkatnya ketahanan keluarga berkualitas	Peningkatan kualitas, kuantitas dan kemandirian keluarga	Menyusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
			Melaksanakan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk untuk memantau respon isu-isu kependudukan secara proaktif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Melaksanakan kerjasama kependidikan di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.
			Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait isu kependudukan seperti program Keluarga Berencana
			Memastikan data keluarga digunakan secara efektif dalam perancangan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
			Memastikan keluarga memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi utamanya termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial
			Melaksanakan bimbingan perkawinan konseling keluarga dan sosialisasi mengenai perkawinan untuk meningkatkan kesiapan kelaurga.
			Memastikan ketersediaan sistem pelayanna KB yang adil dan berkualitas terutama pemenuhan kebutuhan moetose kontraspesi modern.
			Mempeerluas pelayanan KB sampai kedesa-desa terpencil serta menysasar kelompok sasaran khusus seperti pasangan usia subur (PUS).
	Meningkatkan Akuntabilias Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan Perencanaan Kinerja yang kuat	Menetapkan Indikator Kinerja Utama yang relevan untuk menjadi ukuran keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan pembentukan dan tugas fungsi.
			Memastikan setiap Indikator Kinerja Utama selaras dengan sasaran pembangunan daerah untuk menunjukkan kotribusi perangkat daerah
		Pengukuran Kinerja yang akurat	Melakukan pengumpulan data kienrja secara terukur dan sistematis, baikdata hasil maupun keluaran secara berjenjang
			Memanfaatkan data LPPD/LAKIP sebelumnya sebagai dasar untuk menetapkan target realistis ditahun berikutnya.
		Pelaporan Kinerja yang terpercaya.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) disampaikan tepat waktu, dan memberikan informasi kinerja yang terukur.
			Monitoring dan evaluasi dilakukabn secara berkala

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Evaluasi Internal yang berkelanjutan	Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas implemmtasi SAKIP.
			Menggunakan temuan dan rekomendasi dari evaluasi untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja.
		Capaian kinerja yang optimal	Memastikan anggaran dan sumber daya lainnya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan
			Fokus pada peningkatan kinerja.

3.3.1 Tema Tahapan Pembangunan.

Kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, RPJMD Kabupaten Seruyan dirancang berdasarkan tema pembangunan tahunan. Tema ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga memudahkan implementasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap tema memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah Transformasi Pembangunan Menuju Kabupaten Seruyan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Tema pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan adalah peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di segala sektor, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta pengelolaan data valid. Tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, keluarga yang berkualitas sebagai dasar pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 3.3.1.1

Penahapan Renstra DP3AP2KB 5 Tahun Mendatang

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Penguatan kebijakan (<i>policy strengthening</i>) (Perda KLA, Perbup PUG, Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025-2045, Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029).	- Penyebar luasan/ Sosialisasi kebijakan - Implementasi kebijakan dan program strategis. - Pembentukan organisasi kemasyarakatan secara menyeluruh (Forum Anak Daerah, Satgas SIGRAKPA dll)	- Penyebar luasan fungsi organisasi kemasyarakatan sampai tingkat desa. - Meningkatkan peran serta masyarakat. - Sosialisasi program kegiatan	- Mendorong penyediaan sarana dan prasarana lembaga layanan (RBRA, Kampung KB Mandiri, Puspaga dll) - Monitoring dan evaluasi program	Keberlanjutan dan optimalisasi program

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029, maka arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem, kelembagaan, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
2. Melakukan pembinaan terhadap organisasi perempuan.
3. Membentuk kelompok ekonomi produktif dengan melakukan pendampingan secara berkelanjutan.
4. Menumbuhkan kepedulian dan kewaspadaan anak/siswa terhadap peristiwa yang menyimpang disekitarnya melalui fungsi forum anak daerah.
5. Mempercepat penyediaan ruang bermain ramah anak (RBRA) sebagai wadah aktifitas dan pengembangan kreatifitas anak.
6. Melakukan kerjasama lintas sektoral dengan memberlakukan jam malam bagi anak/remaja.
7. Sosialisasi menyeluruh Undang-undang Perlindungan Terhadap Anak, dan Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Mengupayakan rasa aman kepada anak dengan melibatkan peran aktif masyarakat dengan membentuk satuan tugas siap gerak pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (SIGRAKPA).
9. Membentuk lembaga konseling dan pusat pembelajaran keluarga.
10. Menyediakan aplikasi informasi layanan anak (ILA) berbasis online.
11. Menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
12. Melaksanakan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk untuk memantau respon isu-isu kependudukan secara proaktif..

13. Melaksanakan kerjasam kependidikan di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.
14. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait isu kependudukan seperti program Keluarga Berencana.
15. Memastikan data keluarga digunakan secara efektif dalam perancangan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
16. Memastikan keluarga memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi utamanya termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial.
17. Memperluas pelayanan KB sampai kedesa-desa terpencil serta menysasar kelompok sasaran khusus seperti pasangan usia subur (PUS).

Tabel 3.4.1**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.	Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai	1.Meningkatkan sistem pelayanan aduan tindak kekerasan dan eksploitasi	1. Pengembangan sistem, kelembagaan, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	
2.	Menganalisa kebijakan yang ada saat ini, apakah perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian untuk mencapai sasaran dan tujuan.	2.Meningkatkan Sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak.	2. Melakukan pembinaan terhadap organisasi perempuan.	
3	Melakukan identifikasi stakeholder yang terkait, seperti perangkat daerah yang terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada.	3.Mengembangkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.	3. Mengoptimalkan fungsi penyedia layanan perempuan, PUSPA dan PUSPAGA	
4	Mengembangkan strategi, yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.	4.Meningkatkan Proporsi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan daerah.	4. Menumbuhkan kepedulian dan kewaspadaan anak/siswa terhadap peristiwa yang menyimpang disekitarnya melalui fungsi forum anak daerah.	
5	Menentukan prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan. Mengembangkan rencana aksi yang spesifik, terukur dan dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran.	5.Mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai sektor.	5. Mempercepat penyediaan ruang publik ramah anak sebagai wadah aktifitas dan pengembangan kreatifitas anak	
6	Mengembangkan rencana aksi yang spesifik, terukur dan dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana aksi dengan	6.Mengoptimalkan peran serta kelompok ketahanan keluarga.	6. Menyediakan layanan pengaduan berbasis online/digital.	
		7.Mengoptimalkan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk dalam pembangunan keluarga		

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	stakeholder terkait untuk memastikan bahwa kebijakan itu efektif dan efisien.		7. Mengoptimalkan fungsi Satgas Siap Gerak Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (SIGRAKPA) 8. Menyusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). 9. Melaksanakan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk untuk memantau respon isu-isu kependudukan secara proaktif. 10. Melaksanakan kerjasama kependidikan di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. 11. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait isu kependudukan seperti program Keluarga Berencana. 12. Memastikan data keluarga digunakan secara efektif dalam perancangan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. 13. Memastikan keluarga memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi utamanya termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial 14. Melaksanakan bimbingan perkawinan konseling keluarga dan sosialisasi mengenai perkawinan untuk meningkatkan kesiapan keluarga. 15. Memastikan ketersediaan sistem pelayanan KB yang	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
			adil dan berkualitas terutama pemenuhan kebutuhan moetose kontraspesi modern 16. Memperluas pelayanan KB sampai kedesa-desa terpencil serta menysasar kelompok sasaran khusus seperti pasangan usia subur (PUS).	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional dalam periode 2025-2029 meliputi Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator Kinerja Sub Kegiatan, Target dan Pagu Indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Seruyan 2025 - 2029.

Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki 2 Urusan Pemerintahan yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai 10 Program, dengan 31 Kegiatan dan 197 Sub Kegiatan pada Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota.

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- C Program Peningkatan Kualitas Keluarga
1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

- D. Program Perlindungan Perempuan.
 - 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
 - 1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- F. Program Pemenuhan Hak Anak
 - 1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

G. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

H. Program Pengendalian Penduduk.

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.

- 2) Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal.

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/ kota.
1. Program Pembinaan Keluarga Berencana.
 1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana.
 - 2) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
 2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 - 1) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
 3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB.
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas.
- J. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 1) Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
 - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga).
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R

dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

- 5) Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).
- 2) Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

Tabel 4.1.1

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keluarga yang berkualitas.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Langkah-langkah perhitungan IKG dan formulanya :	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan PUG	Jumlah lembaga pemerintah dibagi lembaga yang mendapatkan pendampingan PUG	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat kabupaten
				Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki.					2. Persentase perempuan dilembaga pemerintahan						Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)
				Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmoni.					3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	TPAK Perempuan = $\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan} / \text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas}}{100\%}$	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan peran aktif Organisasi Perempuan dalam pembangunan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Jumlah organisasi perempuan dibagi organisasi perempuan yang aktif	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG
				Menghitung Indeks Dimensi							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan fungsi Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	Jumlah Lembaga yang ada dibagi lembaga yang mengikuti diklat	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan
				Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik.											Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
				Menghitung Indeks Kesetaraan Gender					- Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar	Persentase = $\frac{\text{Jumlah keluarga yang mencapai standar} / \text{Jumlah keluarga yang mengikuti pembelajaran}}{100\%}$	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah kegiatan peningkatan kualits keluarga		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia
				Menghitung Indeks Ketimpangan Gender											Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				$IKG = 1 - \frac{HABM(G_1, G_2)}{G_{KL}}$							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah lembaga dibagi lembaga yang mendapatkan pelatihan	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan
											Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya	Jumlah layanan keluarga mewujudkan kesetaraan gender		Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Meningkatkan Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota
						UPT PPA	Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	- Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.	Persentase = (Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terdata) x 100%	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan layanan rujukan lanjutan bagi korban	Jumlah penerima manfaat	Jumlah kasus dibagi kasus yang mendapatkan rujukan lanjutan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
											Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan layanan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi		Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)
						Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	- Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan.	Persentase = (Jumlah kebijakan yang menggunakan data gender dan anak / Jumlah total kebijakan) x 100%	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Jumlah kegiatan pengumpulan data gender		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
							Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	IPHA = (Jumlah indikator yang dipenuhi / Jumlah total indikator) x 100%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
															Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
											Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Lembaga/ Forum Anak Daerah yang dibentuk di tingkat kecamatan.		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
											Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
											Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	
											pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	
						UPT PPA	Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanggana tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komperhensif.	Persentase = (Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komperhensif / Jumlah total anak yang memerlukan perlindungan khusus) x 100%	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan pengaduan	Jumlah kasus anak dibagi kasus yang mendapatkan pendampingan	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota
									2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	IPKA = (Skor total indikator perlindungan anak / Skor maksimum indikator perlindungan anak) x 100%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatkan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
															Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatkan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak
		Meningkatkan Kelahiran Keluarga Berkualitas	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	$iBangga = \frac{\sum_{i=1}^k D_i}{k}$ D1= Dimensi ke -i k = banyaknya dimensi i = 1, 2, 3 $D_1 = \frac{\sum_{j=1}^p w_{1j} V_{1j}}{j-1}$ Dengan V1j : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; W1j : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan p : banyaknya indikator apda dimensi ketentraman; dimana j = 1,2,.....6 D2 = Indeks Kemandirian, perhitungan : $D_2 = \frac{\sum_{j=1}^p w_{2j} V_{2j}}{j-1}$ Dengan V2j : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; W2j : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana j = 1,2,.....7. D3 = Indeks Kebahagiaan, perhitungan $D_3 = \frac{\sum_{j=1}^p w_{3j} V_{3j}}{j-1}$	Pendataan Keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. TFR	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49 tahun);	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Kebijakan yang disusun		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
															Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota
															Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
															Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Kalur Pendidikan Nonformal dan informal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Tersedianya Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Kalur Pendidikan Nonformal dan informal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
															Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah
									2. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFR = (Jumlah kelahiran pada kelompok umur tertentu / Jumlah wanita pada kelompok umur tertentu) x 1.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab	Cakupan Pelaporan Data per kecamatan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
															Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya
															Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Dengan V3j : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; W3j : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kebahagian; dimana j = 1,2,...,4.											Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Terlaksananya Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk
					Laporan DALAP bulanan	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR))	mCPR = (Jumlah wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi modern / Jumlah total wanita usia subur) x 100%	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase keluarga yang terpapar Bangsa Kencana		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
															Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
															Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan
											Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Lini Lapangan yang diberdayakan	Jumlah Tenaga Lini Lapangan dibagi Tenaga Lapangan yang diberdayakan	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
															Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
															Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
									2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Unmet Need = (Jumlah wanita usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi dan tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kehamilan / Jumlah total wanita	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan KB Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Fasyankes		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Meningkatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah Laporan Hasil Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN				
									Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (demand satisfied)	usia subur yang menikah atau berpasangan) x 100%					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatkan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
									Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				
									Jumlah Ibu nifas menerima pelayanan KB						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya	Meningkatkan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
															Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				
															Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatkan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pengurus Pokja Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Meningkatkan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	
																		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atas Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atas Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	
																		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
																		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
					Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan Keluarga Sejahtera	- Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah Keluarga dibagi keluarga yang mengikuti poktan	Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				
									Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				
									Indeks Lansia Berdaya						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga				

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi Jumlah kelompok sasaran* pendampingan keluarga 1000 HPK						Akseptor (UPPKA)	Akseptor (UPPKA)	Keluarga Akseptor (UPPKA)
															Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
															Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)
															Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan
															Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
											Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga	Jumlah organisasi dibagi organisasi yang terlibat dalam pembangunan keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
															Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan

TABEL 4.1.2

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9.556.392.932,00		9.869.066.873,00		10.125.150.797,00		10.745.788.916,00		11.407.569.644,00		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.586.392.932,00		9.024.066.873,00		9.110.150.797,00		9.785.788.916,00		10.477.569.644,00		
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	8.586.392.932,00	100	9.024.066.873,00	100	9.110.150.797,00	100	9.785.788.916,00	100	10.477.569.644,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.520.392.932,00		6.872.066.873,00		6.944.150.797,00		7.656.788.916,00		8.348.569.644,00		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	38	6.520.392.932,00	40	6.872.066.873,00	40	6.944.150.797,00	40	7.656.788.916,00	40	8.348.569.644,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4				4				4			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2				2				2			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.366.392.932,00		6.752.066.873,00		6.834.150.797,00		7.546.788.916,00		8.238.569.644,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	38	6.366.392.932,00	40	6.752.066.873,00	40	6.834.150.797,00	40	7.546.788.916,00	40	8.238.569.644,00		
2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				144.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	144.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.08.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	0	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	20.000.000,00	12	18.000.000,00	12	20.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0		0		0		2		2			
2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		10.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0	0,00	0	0,00	0	10.000.000,00	2	8.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	0	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	135.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		0		0		2		2			
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				375.000.000,00		413.000.000,00		375.000.000,00		365.000.000,00		363.000.000,00		
Terlaksananya administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi	2	2	375.000.000,00	2	413.000.000,00	2	375.000.000,00	2	365.000.000,00	2	363.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Perangkat Daerah	Kunjungan Tamu (Laporan)															
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	50				50				50					50
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3				3				3					3
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	5				5				5					5
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1				1				1					1
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2				2				2					2
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2				2				2					2
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1				1				1					1
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		8.000.000,00				
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	8.000.000,00				

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kantor yang Disediakan (Paket)													
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	60.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tamu (Laporan)													
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				252.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	50	252.000.000,00	50	300.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	2	100.000.000,00	1	150.000.000,00	2	175.000.000,00	2	175.000.000,00	2	150.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	9	2		2		2		2		2			
2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	9	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		0,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	0	0,00		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		20.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	2	50.000.000,00	1	20.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.311.000.000,00		1.294.000.000,00		1.311.000.000,00		1.281.000.000,00		1.281.000.000,00		
Tersedianya unit kerja yang mendapatkan layanan jasa Penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.311.000.000,00	12	1.294.000.000,00	12	1.311.000.000,00	12	1.281.000.000,00	12	1.281.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12				12				12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	12		12		12		12		12			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya				100.000.000,00		133.000.000,00		150.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	133.000.000,00	12	150.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.200.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.200.000.000,00	12	1.150.000.000,00	12	1.150.000.000,00	12	1.150.000.000,00	12	1.150.000.000,00		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.000.000,00		155.000.000,00		165.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	140.000.000,00	1	155.000.000,00	1	165.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1				1				1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10				10				10			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1				1				1			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	20.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN				575.000.000,00		455.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Meningkatnya kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	48,06	51,80	575.000.000,00	52,75	455.000.000,00	53,40	480.000.000,00	54,50	480.000.000,00	54,80	480.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	1,00	1,2		1,4		1,60		1,80		2,00			
	Persentase perempuan di lembaga pemerintahan (%)	12	12		13		14		15		16			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	0	50.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	30		30		30		30		30			
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	30	50.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				500.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	4	0	500.000.000,00	0	400.000.000,00	0	400.000.000,00	0	400.000.000,00	0	400.000.000,00		
	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	4	4		4		4		4		4			
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				500.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	4	4	500.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)													
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan				0		0		0		0		0		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota														
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)			0		0		0		0		0		
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				75.000.000,00		75.000.000,00		120.000.000,00		100.000.000,00		60.000.000,00		
Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	120.000.000,00	100	100.000.000,00	100	60.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	70.000.000,00	5	50.000.000,00	5	30.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kewenangan Kabupaten	Tingkat Kabupaten/Kota (orang)													
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	70.000.000,00	5	50.000.000,00	5	30.000.000,00		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	25	30.000.000,00		
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	25	30.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Lembaga)													
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	10	30	60.000.000,00	40	60.000.000,00	60	100.000.000,00	80	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten.	Jumlah keluarga yang mendapa tkan layanan penjangk auan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapa tkan layanan penjangk auan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Meningkatnya Pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten.	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)		1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	6		6		6		6		6				
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				140.000.000,00		140.000.000,00		180.000.000,00		155.000.000,00		165.000.000,00		
Terjaminnya Pemeuhan Hak Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	51,22	51,80	140.000.000,00	60	140.000.000,00	61	180.000.000,00	61,25	155.000.000,00	61,50	165.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten.	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				90.000.000,00		90.000.000,00		130.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten.	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	130.000.000,00	3	105.000.000,00	3	115.000.000,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1				1				1			
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	2				2				2			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	50.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Lembaga)													
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				95.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	79,82	79,91	95.000.000,00	79,93	90.000.000,00	79,96	110.000.000,00	79,98	100.000.000,00	80,10	100.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				55.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten.	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	55.000.000,00	12	50.000.000,00	15	70.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00		
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				55.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	55.000.000,00	12	50.000.000,00	15	70.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten.	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.310.000.000,00		2.130.000.000,00		2.465.000.000,00		2.465.000.000,00		2.460.000.000,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				450.000.000,00		395.000.000,00		410.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Jiwa)	2,21	2,20	450.000.000,00	2,20	395.000.000,00	2,20	410.000.000,00	2,19	400.000.000,00	2,19	410.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	38,90	38.30-		3790-		3760-		3730-		3700-			
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	8,00	10,90		12,20		13,50		14,60		15,70			
14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				280.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	0	0	280.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2	0		2		2		2		2			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				200.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2	0	80.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah				0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	0	0	0,00	10	70.000.000,00	10	70.000.000,00	10	70.000.000,00	10	70.000.000,00		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				170.000.000,00		195.000.000,00		210.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten.	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	0	4	170.000.000,00	4	195.000.000,00	4	210.000.000,00	4	200.000.000,00	4	210.000.000,00		
	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	100	100		100		100		100					
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	10	1		1		1		1					
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				25.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	12	12	25.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	10	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota				0,00		40.000.000,00		50.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	0	4	0,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00		
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				65.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	100	100	65.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.055.000.000,00		905.000.000,00		1.035.000.000,00		1.020.000.000,00		1.050.000.000,00		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	78,03	75,00	1.055.000.000,00	75,00	905.000.000,00	75,00	1.035.000.000,00	75,00	1.020.000.000,00	75,00	1.050.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	3,63	6,80		6,80		6,80		6,70		6,70			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Ibu Nifas menerima pelayanan KB (Orang)	1.396	1.563		1.626		1.707		1.809		1.936			
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	90,40	91,10		91,40		91,60		91,90		92,00			
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	9,70	5,40		4,70		4,30		4,20		4,10			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	10	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00		
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	10	10		10		10		10		10			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)													
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	10	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	10	10	150.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	0	0	0,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				375.000.000,00		235.000.000,00		275.000.000,00		260.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	100	100	375.000.000,00	100	235.000.000,00	100	275.000.000,00	100	260.000.000,00	100	250.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	0	100		100		100		100		100			
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				300.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	100	100	300.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				25.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	0	100	25.000.000,00	100	35.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	50.000.000,00		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		245.000.000,00		260.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	240.000.000,00	12	250.000.000,00	12	245.000.000,00	12	260.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	12	114		114		114		114					

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	0	0		10		10		10		10			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	12	114	100.000.000,00	114	50.000.000,00	114	50.000.000,00	114	50.000.000,00	114	50.000.000,00		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KB														
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				0,00		40.000.000,00		50.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	0	0	0,00	10	40.000.000,00	10	50.000.000,00	10	45.000.000,00	10	60.000.000,00		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				130.000.000,00		130.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		240.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	0	100	130.000.000,00	100	130.000.000,00	100	210.000.000,00	100	215.000.000,00	100	240.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Berencana) (Kampung)													
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	100	100		100		100		100		100			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				70.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	100	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				30.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	0	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	60.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				805.000.000,00		830.000.000,00		1.020.000.000,00		1.045.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	80	90	805.000.000,00	95	830.000.000,00	100	1.020.000.000,00	100	1.045.000.000,00	100	1.000.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Indeks pengasuhan keluarga remaja (Indeks)	88,20	89,80		90,60		91,20		91,90		92,6			
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	58,20	61,60		63,20		64,60		66,00		67,40			
	Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (Orang)	156	225		230		235		240		245			
	Jumlah kelompok sasaran pendampingan keluarga seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Kelompok)	104	135		145		147		149		150			
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				505.000.000,00		530.000.000,00		670.000.000,00		695.000.000,00		650.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	114	0	505.000.000,00	0	530.000.000,00	0	670.000.000,00	0	695.000.000,00	0	650.000.000,00		
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	378	378		378		378		378		378			
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks	0	30		35		45		45		50			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Pembangunan Keluarga (Orang)															
	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0	5				5				5					5
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	10	10				10				10					10
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	20	20				20				20					20

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	114	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	0	30	25.000.000,00	35	50.000.000,00	45	50.000.000,00	45	65.000.000,00	50	50.000.000,00		
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	10	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Laporan)													
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				80.000.000,00		80.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	378	378	80.000.000,00	378	80.000.000,00	378	200.000.000,00	378	200.000.000,00	378	200.000.000,00		
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	20	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	2	2				2		2		2			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)													
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		

Tabel 4.1.3
Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 -2029

Program Prioritas Presiden	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
Prevalensi Stunting	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR))		75,00	477.402.000	75,00	70.000.000	75,00	70.000.000	75,00	100.000.000	75,00	100.000.000	75,00	150.000.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		6,80		6,80		6,80		6,80		6,70		6,70	
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (demand satisfied)		90,80		91,10		91,40		91,60		91,90		92	
		Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		6,80		5,40		4,70		4,30		4,20		4,10	
		Jumlah Ibu nifas menerima pelayanan KB		1.517		1.563		1.626		1.707		1.809		1.936	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Pengurus Pokja Kampung KB		100	477.402.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000

Program Prioritas Presiden	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Penyuluhan/ prkatek tata cara masak sehat atasi stunting dan pemberian bahan makanan kepada Keluarga Reiko Stunting (KRS)	100	477.402.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.		100	1.031.200.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja		89,00		89,80		90,6-		91,20		91,90		92,60	
		Indeks Lansia Berdaya		58,90		61,60		63,20		64,60		66,00		67,40	
		Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting.		200		225		230		235		240		245	

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Presiden	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
		Jumlah kelompok sasaran pendampingan keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).		120		135		145		147		149		150	
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan		40	150.000.000	45	150.000.000	50	150.000.000	55	150.000.000	60	150.000.000	65	150.000.000
	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksanaan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga		3	1.031.200.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Presiden	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Sub Kegiatan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Pendataan, evaluasi, monitoring dan pendampingan.	2	378.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan	Penyuluhan dan praktek menu sehat atasi stunting dan pemberian bahan makanan kepada Keluarga Resiko Stunting	2	653.200.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000

Tabel 4.1.4
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025 -2029

Program Prioritas Gubernur	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
Pendampingan ibu hamil dan pasca hamil	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)		75,00	638.375.000	75,00	170.000.000	75,00	120.000.000	75,00	150.000.000	75,00	150.000.000	75,00	200.000.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		6,80		6,80		6,80		6,80		6,70		6,70	
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (demand satisfied)		90,80		91,10		91,40		91,60		91,90		92,00	
		Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		6,80		5,40		4,70		4,30		4,20		4,10	
		Jumlah Ibu nifas menerima pelayanan KB		1.517		1.563		1.626		1.707		1.809		1.936	
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		24	160.973.000	24	100.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	114	50.000.000

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Gubernur	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Memberikan Pelayanan KB Gratis	114	160.973.000	114	100.000.000	114	50.000.000	114	50.000.000	114	50.000.000	114	50.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pengurus Pokja Kampung KB		100	477.402.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Penyuluhan/ prkatek tata cara masak sehat atasi stunting dan pemberian bahan makanan kepada Keluarga Reiko Stunting (KRS)	100	477.402.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000

Program Prioritas Gubernur	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga.		100	1.121.198.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja		89,00		89,80		90,6-		91,20		91,90		92,60	
		Indeks Lansia Berdaya		58,90		61,60		63,20		64,60		66,00		67,40	
		Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan sunting.		200		225		230		235		240		245	
		Jumlah kelompok sasaran* pendampingan keluarga 1000 HPK		120		135		145		147		149		150	
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga		3	1.031.200.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Gubernur	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Sub Kegiatan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Pendataan, evaluasi. monitoring dan pendampingan.	2	378.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan	Penyuluhan dan praktek menu sehat atasi stunting dan pemberian bahan makanan kepada Keluarga Resiko Stunting	2	653.200.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan		40	89.998.000	45	80.000.000	50	80.000.000	55	200.000.000	60	200.000.000	65	200.000.000

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Gubernur	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA).	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatanEkonomi Keluarga) yang dibentuk	Penyuluhan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan.	378	89.998. 000	378	80.000. 000	378	80.000. 000	378	200.000. 000	378	200.000. 000	378	200.000. 000

Tabel 4.1.5

**Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Seruyan
Tahun 2025 -2029**

Program Prioritas Bupati	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi, pelayanan umum , penyelenggaraan pemerintahan desa.	Program Perlindungan Perempuan	Peresentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.		100	21.750.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	70.000.000	100	50.000.000	100	30.000.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat		5	21.750.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	70.000.000	5	50.000.000	5	30.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Atau : Sub Kegiatan Layanan Pendampingan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1. Memberikan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. 2. Mengoptimalkan fungsi Satgas Siap Gerak Pencegahan Kekerasan Terhadap Ibu dan	5	21.750.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	70.000.000	5	50.000.000		30.000.000

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Bupati	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
	korban bagi perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota.		Anak (SIGRAKPA). 3. Menyediakan Sistem Pelaporan berbasis digital (online)												
	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.		100	55.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	70.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		79,85		79,91		79,93		79,96		79,98		80,10	
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga		10	55.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	15	70.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000
	Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	1. Memberikan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. 2. Mengoptimalkan fungsi Satgas	10	55.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	15	70.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Bupati	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
			Siap Gerak Pencegahan Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak (SIGRAKPA). 3. Menyediakan Sistem Pelaporan berbasis digital (online)												
	Program Pengendalian Penduduk.	Angka Kelahiran Total (TFR)		2,21		2,20	200.000.000	2,20	50.000.000	2,20	50.000.000	2,19	50.000.000	2,19	50.000.000
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		38,60		38,30		37,90		37,60		37,30		37,00	
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri		9,50		10,90		12,20		13,50		14,60		15,70	
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian	Jumlah Dokumen Kebijakan yang disusun		-	-	1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Bupati	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
	Kuantitas Penduduk														
	Sub Kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025-2045 (GDPK). 2. Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 5 Tahun 2025-2030 Kabupaten Seruyan		-	1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga		85		90		95		100		100		100	350.000.000
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja		89,00		89,80		90,60		91,20		91,90			
		Indeks Lansia Berdaya		59,90		61,60		63,20		64,60		66,00			
		Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi		200		225		230		235		240			

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Bupati	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
		pencegahan stunting.													
		Jumlah kelompok sasaran* pendampingan keluarga 1000 HPK		120		135		145		147		149			
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan		40	89 998 000	45	230.000.000	50	230.000.000	55	350.000.000	60	350.000.000	65	350.000.000
	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Penyuluhan 1000 HPK	114		10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA).	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Pembentukan Sekolah Lansia	378	89 998.000	378	80.000.000	378	80.000.000	378	200.000.000	378	200.000.000	378	200.000.000

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Program Prioritas Bupati	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Proyeksi Strategis	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu	Vol	Pagu
		(UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatanEkonomi Keluarga) yang dibentuk													

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja perangkat daerah secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL KINERJA TUJUAN/ SASARAN (BASELINE 2024)	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
						TAHUN					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga yang berkualitas.		Indeks Pembangunan Gender (IPG).	89,49	Indeks	89,70	89,80	89,90	90,00	90,10	90,20
		Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,6	Indeks	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39
		Meningkatkan ketahanan keluarga berkualitas.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,40	Indeks	65,70	66,90	68,00	69,10	70,20	71,30
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	53,70	Nilai	55,00	58,00	60,00	61,00	62,00	63,00

Tabel 4.2.2

Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Program	Ourcomne	Indikator Program dan IKK	Satu -an	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -				
						Thn Ke 1	Thn Ke 2	Thn ke 3	Thn ke 4	Thn ke 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	1,00	1,00	1,20	1,40	1,80	1,20
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	50,00	50,60	51,80	52,75	53,40	54,50
			Persentase perempuan dilembaga pemerintahan	%	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00
2	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.	%	100	100	100	100	100	100
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	10,00	20,00	30,00	40,00	60,00	80,00
4	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan.	%	100	100	100	100	100	100
5	Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	51,22	51,53	51,80	60,00	61,00	61,25
6	Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganannya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.	%	100	100	100	100	100	100
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	79,82	79,85	79,91	79,93	79,96	79,98

RENSTRA DP3AP2KB Tahun 2025-2029

No	Program	Ourcomne	Indikator Program dan IKK	Satu -an	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/ Sasaran (Baseline 2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -				
						Thn Ke 1	Thn Ke 2	Thn ke 3	Thn ke 4	Thn ke 5
7	Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	Orang/ jiwa	2,21	2,21	2,20	2,20	2,20	2,19
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	38,90	38,60	38,30	37,90	37,60	37,30
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	8,00	9,50	10,90	12,20	13,50	14,50
8	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	78,03	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	3,63	6,80	6,80	6,80	6,80	6,70
			Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (demand satisfied)	%	90,40	90,80	91,10	91,40	91,60	91,90
			Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	9,70	6,80	5,40	4,70	4,30	4,20
			Jumlah Ibu nifas menerima pelayanan KB	Orang	1,396	1,517	1,563	1,626	1,707	1,809
9	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100
			Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	88,20	89,00	89,80	90,60	91,20	91,90
			Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,20	89,00	89,80	90,60	91,20	91,90
			Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan sunting.	Orang	156	200	225	230	235	240
			Jumlah kelompok sasaran pendampingan keluarga 1000 HPK	Kelompok	104	120	135	145	147	149
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan akuntabel dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Tahun 2026 , Tahun 2027, Tahun 2028 dan Tahun 2029. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.

